

PURA NEGARA GAMBUR ANGLAYANG

(ANALISIS FRAMING MEDIA DAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA)

**I Gede Titah Pratyaksa¹; I Nyoman Buda Asmara Putra²; Niluh Wiwik Eka Putri³;
I Gusti Ayu Putu Darmayanti⁴**
Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan^{1;2;3};
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar⁴
Email: titahpratyaksa@gmail.com¹; inyomanbudaasmaraputra29@gmail.com²;
wiwikekaputri@gmail.com³; agungdarmayanti68@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pemberitaan media terhadap Pura Negara Gambur Anglayang di Desa Kubutambahan, Buleleng, sebagai simbol moderasi beragama dan ruang komunikasi antarbudaya. Media memiliki kekuatan dalam membentuk realitas sosial melalui strategi framing yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu toleransi dan keberagaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing dari Robert M. Entman, yang mencakup empat elemen utama: define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan suggest remedies. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap berita daring yang dimuat dalam tiga media lokal Bali, yaitu Bali Express, Nusa Bali, dan Detik Bali, selama periode 2022–2024. Selain itu, dokumentasi berupa buku, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat konteks dan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media secara umum membingkai Pura Negara Gambur Anglayang dalam narasi yang positif dan mendukung citra harmoni antarumat beragama. Bali Express menyoroti peran pura sebagai pusat integrasi budaya dan pariwisata spiritual; Nusa Bali menekankan fungsi sosial-keagamaan pura sebagai ruang toleransi masyarakat; dan Detik Bali lebih fokus pada aspek simbolik pura dalam wacana nasional tentang keberagaman. Framing yang dibangun media-media ini cenderung tidak mengangkat dinamika atau potensi ketegangan di tingkat lokal, tetapi justru memperkuat citra idealistik tentang toleransi. Dalam konteks komunikasi antarbudaya di Kubutambahan, framing ini sebagian besar sejalan dengan realitas sosial, di mana masyarakat menunjukkan praktik hidup berdampingan secara damai antarumat. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana media lokal mengonstruksi wacana keberagaman dan bagaimana wacana tersebut mencerminkan atau menyembunyikan realitas komunikasi antarbudaya. Temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan literasi media, studi komunikasi budaya, dan penguatan narasi toleransi berbasis komunitas.

Kata Kunci: Pura Negara Gambur Anglayang, Framing Media, Komunikasi Antar Budaya, Moderasi Beragama.

ABSTRACT

This study aims to analyze media constructions of news coverage on Pura Negara Gambur Anglayang in Kubutambahan Village, Buleleng, as a symbol of religious moderation and a space for intercultural communication. The media holds significant power in shaping social reality through framing strategies that influence public

perceptions of tolerance and diversity issues. This research adopts a descriptive qualitative approach using Robert M. Entman's framing analysis method, which includes four main elements: defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and suggesting remedies. Data were collected through observations of online news reports published in three Bali-based local media outlets—Bali Express, Nusa Bali, and Detik Bali—during the 2022–2024 period. In addition, documentation such as books, academic journals, and prior studies were used to strengthen the context and validity of findings. The results show that all three media outlets generally frame Pura Negara Gambur Anglayang within a positive narrative that supports the image of interfaith harmony. Bali Express highlights the temple's role as a center of cultural integration and spiritual tourism; Nusa Bali emphasizes its socio-religious function as a space for community tolerance; while Detik Bali focuses more on the temple's symbolic significance within national discourses on diversity. The framing constructed by these media tends not to raise issues of local dynamics or potential tensions, but instead reinforces idealistic images of tolerance. Within the context of intercultural communication in Kubutambahan, these framings largely align with social realities, as communities demonstrate peaceful coexistence practices among adherents of different religions. This research is significant for critically examining how local media construct discourses of diversity and how such discourses reflect—or obscure—the realities of intercultural communication. The findings contribute to media literacy development, cultural communication studies, and the strengthening of community-based narratives of tolerance.

Keywords: *Pura Negara Gambur Anglayang, Media Framing, Intercultural Communication, Religious Moderation*

I PENDAHULUAN

Pura Negara Gambur Anglayang di Desa Kubutambahan, Buleleng, Bali, menjadi sorotan karena narasinya sebagai simbol moderasi beragama dan toleransi. Media seperti *Bali Express*, *Nusa Bali*, dan *Detik Bali* aktif memberitakan peran pura ini dalam menciptakan kerukunan antarumat. Isu ini menjadi penting dalam konteks sosial Indonesia yang rentan terhadap konflik berbasis agama. Representasi simbolik pura tersebut memperlihatkan bahwa ruang sakral dapat berperan sebagai titik temu antarbudaya. Namun, bagaimana media membingkai pesan-pesan tersebut perlu dikaji secara kritis.

Media tidak bersifat netral dalam menyampaikan informasi, melainkan melakukan konstruksi realitas melalui proses framing. Framing yang dipilih media dapat memengaruhi cara masyarakat memahami makna toleransi di sekitar pura. Bisa jadi media mengedepankan narasi harmoni, padahal di lapangan terdapat dinamika sosial yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting menelusuri sejauh mana narasi media tersebut sesuai dengan pengalaman warga lokal. Penelitian ini ingin menjawab apakah konstruksi media telah mencerminkan realitas komunikasi antarbudaya yang terjadi.

Permasalahan muncul ketika media memproduksi narasi simbolik tanpa menyertakan suara komunitas yang terlibat langsung. Peliputan yang terlalu idealistik dapat mengabaikan ketegangan atau negosiasi identitas yang sebenarnya terjadi. Hal ini berpotensi menciptakan jarak antara wacana publik dan realitas sosial. Dalam konteks ini, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap konten media dan pengalaman komunikasi

masyarakat sekitar pura. Keterlibatan warga lokal menjadi kunci untuk mengukur keakuratan narasi media.

Penelitian sebelumnya telah menyinggung topik serupa, namun dengan pendekatan yang berbeda. Yulianto (2018) membahas framing pluralisme di media nasional dan menemukan bias ideologis dalam peliputan isu toleransi. Astika (2020) meneliti media lokal Bali dalam melaporkan tradisi keagamaan, namun tidak fokus pada pura sebagai ruang antarbudaya. Wulandari (2021) membandingkan media dalam pemberitaan tempat ibadah multikultural di kota besar, tetapi tanpa menelusuri pengalaman lokal. Adnyani (2022) melihat simbol toleransi pura di media sosial, namun belum mengaitkan dengan framing media arus utama.

Berbeda dari studi-studi tersebut, penelitian ini menggabungkan analisis framing media dengan pendekatan komunikasi antarbudaya. Penelitian ini tidak hanya menilai representasi media, tetapi juga membandingkannya dengan praktik komunikasi masyarakat lokal. Dengan demikian, terdapat dimensi verifikasi antara wacana media dan kenyataan sosial. Hal ini menjadikan penelitian lebih komprehensif dan grounded dalam konteks lokal. Tujuannya untuk melihat sejauh mana narasi media dapat dipercaya dan berguna untuk penguatan toleransi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap toleransi beragama. Ketika media menjadi saluran utama informasi, framing yang mereka buat akan sangat memengaruhi opini masyarakat luas. Narasi yang tidak akurat dapat menciptakan mitos sosial dan mengaburkan persoalan sebenarnya. Dalam konteks multikultural seperti Bali, representasi yang tidak sensitif terhadap dinamika lokal bisa berakibat kontraproduktif. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap framing menjadi sangat mendesak.

Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi antarbudaya dalam konteks ruang sakral di Indonesia. Pura selama ini lebih banyak dikaji dari aspek teologis atau arsitektural, belum banyak ditelaah sebagai arena komunikasi lintas identitas. Dengan mengkaji bagaimana pura dipersepsi oleh media dan komunitas lintas agama, studi ini memberi kontribusi penting bagi pengembangan teori komunikasi budaya lokal. Penelitian ini juga relevan bagi kebijakan publik dalam membangun model toleransi berbasis komunitas. Hasilnya dapat digunakan oleh media, akademisi, dan tokoh agama dalam merumuskan strategi komunikasi yang inklusif.

Penelitian ini menggunakan model analisis framing dari Robert Entman (1993) yang mencakup empat dimensi: define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan suggest remedies. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengurai bagaimana media menyusun narasi toleransi dan perbedaan antarbudaya. Analisis dilakukan pada konten dari *Bali Express*, *Nusa Bali*, dan *Detik Bali* untuk melihat pola dan kecenderungan masing-masing. Temuan akan dibandingkan dengan data lapangan untuk menguji kesesuaian narasi. Hasil penelitian ini diharapkan memperkuat literasi media dan membangun pemahaman kritis masyarakat terhadap isu keberagaman.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana media membingkai pemberitaan mengenai Pura Negara Gambur Anglayang sebagai simbol moderasi beragama dan komunikasi antar budaya di Bali Utara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konstruksi narasi dan makna simbolik dalam teks media serta bagaimana makna tersebut dibentuk dan dipersepsi dalam konteks sosial-budaya lokal.

Penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisasi temuan, tetapi lebih menekankan pada pemahaman makna secara kontekstual dan interpretatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini sangat relevan untuk menganalisis wacana media dalam hubungannya dengan realitas sosial yang lebih luas. Penelitian ini juga mempertimbangkan kompleksitas komunikasi antarbudaya yang hadir dalam ruang sakral dan praktik keagamaan masyarakat. Lokasi penelitian difokuskan pada tiga media yang dijadikan sampel, yaitu Bali Express, Nusa Bali, dan Detik Bali. Ketiga media ini dipilih karena secara aktif memberitakan isu-isu keagamaan dan budaya lokal, termasuk narasi mengenai Pura Negara Gambur Anglayang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah artikel berita, feature, atau opini yang diterbitkan media tersebut antara tahun 2022–2024, yang secara eksplisit menyebutkan topik Pura Negara Gambur Anglayang dan dikaitkan dengan isu toleransi, keberagaman, atau komunikasi lintas budaya. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif berdasarkan tema, relevansi, dan intensitas pemberitaan. Fokus lokasi ini memungkinkan peneliti membandingkan pola framing antar media secara kritis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dokumen digital terhadap artikel berita dari ketiga media online tersebut yang diakses melalui situs resmi masing-masing media. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen tertulis, termasuk buku ilmiah, jurnal penelitian terdahulu, dan arsip media yang relevan dengan tema framing media dan komunikasi antarbudaya. Dokumentasi dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan artikel berdasarkan tanggal, jenis tulisan, serta narasi kunci yang diangkat. Peneliti juga mencatat konteks penerbitan dan aktor yang dikutip dalam berita untuk memahami dinamika wacana yang terbentuk. Dokumentasi ini berfungsi sebagai dasar triangulasi data dalam proses analisis. Teknik analisis data menggunakan model analisis framing dari Robert M. Entman (1993), yang terdiri dari empat elemen utama: (1) *define problems*, yaitu bagaimana media mendefinisikan isu atau persoalan yang muncul; (2) *diagnose causes*, yaitu siapa yang dianggap sebagai penyebab atau sumber persoalan; (3) *make moral judgment*, yaitu nilai atau penilaian moral yang diberikan media terhadap isu tersebut; dan (4) *suggest remedies*, yaitu solusi atau penyelesaian yang disarankan media. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretatif dan induktif dengan membandingkan hasil analisis framing dengan data konteks sosial dan budaya masyarakat di sekitar Pura Negara Gambur Anglayang. Peneliti melakukan konfirmasi silang antara narasi media dengan hasil kajian pustaka dan temuan lapangan dari penelitian terdahulu. Dengan pendekatan ini, kesimpulan tidak hanya menggambarkan bagaimana media membingkai isu toleransi, tetapi juga sejauh mana framing tersebut sesuai dengan realitas komunikasi antarbudaya yang berlangsung di masyarakat lokal. Hasil akhir penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis dalam studi komunikasi budaya, representasi media, serta penguatan toleransi berbasis komunitas.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Framing Berita Bali Express

Analisis framing Robert M. Entman terhadap berita dari Bali Express mengenai Pura Negara Gambur Anglayang di Kubutambahan, Buleleng, Bali, mengungkap konstruksi realitas yang sangat kuat tentang narasi toleransi, keberagaman, dan kearifan lokal budaya Hindu Bali sebagai solusi dan antitesis terhadap isu intoleransi yang dianggap "marak". Menurut Entman, framing melibatkan seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk: (1) mendefinisikan masalah, (2) menginterpretasikan penyebabnya, (3) melakukan evaluasi moral, dan (4) merekomendasikan solusi

perlakuan. Berita ini secara dominan membangun frame "Toleransi dan Keberagaman sebagai DNA Budaya Bali: Pura Gambur Anglayang sebagai Bukti Historis dan Solusi Kontemporer", menawarkan narasi optimis dan berbasis budaya lokal sebagai respons terhadap tantangan sosial nasional.

**Sejarah Pura Negara Gambur Anglayang:
Bukti Keberagaman dan Toleransi
Masyarakat Hindu Bali**



I Putu Mardika - Kamis, 30 Mei 2024 | 09:30 WIB



Pura Negara Gambur Anglayang di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali (DOK. BALI EXPRESS)

Gambar 1. Berita Bali Ekspres
“Sejarah Pura Negara Gambur Anglayang: Bukti Keberagaman
dan Toleransi Masyarakat Hindu Bali”
(Sumber: Bali Exspress, 2024)

Definisi Masalah (*Problem Definition*): "Maraknya Isu Intoleransi" sebagai Latar Belakang yang Kontras. Frame ini membuka berita dengan langsung menempatkan Pura Gambur Anglayang dalam konteks sosial yang lebih luas: "Di tengah maraknya isu intoleransi...". Frasa "maraknya isu intoleransi" berfungsi sebagai definisi implisit dari masalah sosial yang sedang terjadi, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik manifestasi, lokasi, atau aktor dari intoleransi tersebut. Kata "marak" menyiratkan prevalensi dan urgensi masalah ini di tingkat nasional atau bahkan global. Namun, fokus utama bukan pada mendetailkan masalah intoleransi itu sendiri, melainkan pada menyajikan kontras yang tajam. Masalah intoleransi yang "marak" tersebut segera dihadapkan dengan Pura Gambur Anglayang yang "hadir sebagai bukti nyata toleransi dan keberagaman". Dengan demikian, masalah utamanya yang ingin diatasi oleh frame ini adalah persepsi atau realitas melemahnya toleransi dan keberagaman, dan Pura Gambur Anglayang didefinisikan sebagai jawaban konkret, bukti sejarah, dan solusi budaya atas masalah tersebut. Ketidakspesifikan "isu intoleransi" memungkinkan frame ini berlaku luas, sementara penonjolan Pura Gambur Anglayang sebagai "bukti nyata" memfokuskan perhatian pada solusi berbasis kearifan lokal Bali.

Interpretasi Penyebab (*Causal Interpretation*): Keberagaman sebagai Produk Alami Interaksi Sosial-Ekonomi dan Kearifan Lokal. Frame ini memberikan interpretasi kausal yang jelas tentang mengapa toleransi dan keberagaman bisa terwujud dan

bertahan, dengan menekankan dua faktor utama: sejarah sebagai pusat perdagangan multikultural dan kearifan spiritual masyarakat Hindu Bali. Penjelasan sejarah dari pengempon pura, Nyoman Laken, sangat sentral: Pura didirikan pada abad ke-13 "di atas pelabuhan dagang yang ramai bernama Tabaning atau Kuta Baneng" yang menjadi "pusat perdagangan Nusantara, di mana pedagang dari berbagai suku, agama, dan ras berkumpul". Narasi kausal ini menyiratkan bahwa keberagaman bukanlah sesuatu yang diimpor atau dipaksakan, melainkan hasil organik dari interaksi ekonomi dan sosial yang intensif antar kelompok berbeda. Penyebab langsung keberagaman fisik pura (adanya palinggih berbagai etnis) kemudian diperkuat oleh legenda yang diceritakan: pedagang Muslim dari berbagai etnis (Tionghoa, Melayu, Sunda) yang mengalami kesulitan, berdoa di tempat suci lokal, dan kemudian bersama-sama membangun pura sebagai wujud syukur setelah doanya terkabul. Legenda ini berfungsi sebagai interpretasi kausal yang sangat kuat: Toleransi dan integrasi agama/etnis lahir dari (1) kebutuhan praktis (perbaikan kapal, perdagangan), (2) rasa syukur dan penghormatan spiritual yang tulus terhadap kekuatan lokal, meskipun berbeda keyakinan, dan (3) komitmen bersama untuk membangun simbol persatuan (pura) sebagai wujud nyata janji dan terima kasih. Penyebabnya bukanlah doktrin politik modern atau tekanan eksternal, melainkan dinamika sosial-ekonomi alami dan respons spiritual yang dijiwai kearifan lokal. Frame ini menegaskan bahwa akar toleransi Bali sangat dalam, alami, dan berbasis pada interaksi nyata serta penghormatan spiritual.

Evaluasi Moral (*Moral Evaluation*): Toleransi dan Keberagaman sebagai Nilai Luhur dan Identitas Inti Bali. Evaluasi moral dalam frame ini sangat jelas dan positif, mengangkat toleransi, keberagaman, dan kearifan budaya Hindu Bali ke tingkat nilai luhur yang patut dijunjung tinggi dan menjadi kebanggaan. Beberapa elemen kunci membangun evaluasi moral ini:

- a) Bukti Nyata vs. Isu: Posisi Pura Gambur Anglayang sebagai "bukti nyata" toleransi dan keberagaman yang "telah tertanam kuat" secara implisit mengevaluasi nilai-nilai ini sebagai sesuatu yang otentik, berakar, dan dapat diandalkan, berbeda dengan "isu" intoleransi yang mungkin dianggap lebih abstrak, dangkal, atau "diimpor".
- b) Keunikan sebagai Kebanggaan: Penekanan pada "keunikan tersendiri" pura, yaitu adanya "beberapa *palinggih* (tempat suci) yang mencerminkan keberagaman agama dan etnis", mengevaluasi keberagaman fisik ini bukan sebagai anomali, tetapi sebagai simbol kebanggaan dan kekuatan budaya Bali. Keberagaman diintegrasikan secara harmonis ke dalam struktur suci Hindu (pura), menunjukkan penerimaan yang mendalam.
- c) Kearifan Lokal sebagai Solusi: Legenda pembangunan pura oleh pedagang multi-etnis dan multi-agama mengevaluasi tindakan mereka (berdoa di tempat suci lokal, membangun pura bersama) sebagai tindakan yang bermoral, penuh rasa syukur, dan menghormati lokalitas. Respon masyarakat Bali waktu itu (menerima, mungkin membantu) juga dievaluasi secara positif sebagai cerminan kearifan.
- d) Kontinuitas Sejarah sebagai Keabsahan: Usia pura yang sangat tua (dari abad ke-13) dan keberlanjutannya hingga sekarang digunakan sebagai bukti moral tentang ketahanan dan kebenaran nilai toleransi yang diwakilinya. Apa yang bertahan lama dianggap bernilai tinggi dan benar.
- e) Panggilan Normatif: Pernyataan eksplisit di akhir berita, "Pura Negara Gambur Anglayang merupakan bukti nyata toleransi. Pura ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati

perbedaan agama dan etnis," merupakan evaluasi moral yang paling langsung. Ini menempatkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan bukan hanya sebagai nilai Bali, tetapi sebagai kewajiban moral universal ("bagi kita semua") untuk menjaga persatuan bangsa. Nilai-nilai Hindu Bali yang diwujudkan dalam pura ini diangkat menjadi pedoman moral bagi seluruh bangsa Indonesia.

Secara keseluruhan, evaluasi moral frame ini sangat jelas: Toleransi aktif, penghormatan pada perbedaan, dan integrasi keberagaman ke dalam kehidupan spiritual dan sosial adalah nilai-nilai luhur yang melekat (embedded) dan telah dipraktikkan secara nyata dalam budaya Hindu Bali selama berabad-abad, jauh sebelum konsep modern muncul, dan karenanya merupakan model moral yang patut diikuti.

3.2 Analisis Framing Berita Nusa Bali

Penerapan model framing Robert M. Entman pada berita dari Nusa Bali mengenai Pura Negara Gambur Anglayang di Kubutambahan, Buleleng, Bali, mengungkap konstruksi realitas yang sangat terstruktur dan persuasif tentang pluralisme agama dan etnis sebagai inti identitas budaya Bali yang telah teruji waktu dan dimanifestasikan secara sakral. Entman mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk mendefinisikan masalah, menginterpretasi penyebab, melakukan evaluasi moral, dan merekomendasikan solusi. Berita ini secara dominan membangun frame "Pura Pancasila: Pluralisme Sakral Sebagai Warisan Kearifan dan Bukti Historis Kerukunan Nusantara", menempatkan pura kuno ini sebagai simbol hidup dan solusi konkret terhadap tantangan keragaman kontemporer melalui pendekatan unik yang memadukan dimensi spiritual, historis, dan material.

Ragam Palinggih Bukti Bhakti Multietnis

Menjaga Pluralisme di Pura Negara Gambur Anglayang

10 Mar 2024 10:00:32 1555

Pura Negara Gambur Anglayang Palinggih Keragaman Bhakti Multietnis



NusaBali.com - Pura Negara Gambur Anglayang di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng - IST

Terkait

- 18 Jun 2025 07:30 **Perbaikan Pura Penghormatan Berdaya Rp 2,5 Miliar**
- 14 Apr 2025 10:26 **Ribeh, Krama Susut Kaja Bangun Palinggih**
- 08 Apr 2025 09:56 **Pengiriman Patasari di Sidembanut Terbakar**
- 30 Jan 2025 09:07 **Inisik di Vihara Amerta Bhumi**

Stana Ratu Ayu Syahbandar dan stana Ratu Manik Mas adalah mencirikan unsur Buddha dan Cina. Selanjutnya ada Palinggih Ratu Pasek, Ratu Gede Siwa, dan Dewi Sri yang menjadi simbol unsur Hindu.

SINGARAJA, NusaBali
Kabupaten Buleleng memiliki sejumlah pura unik. Salah satunya, Pura Negara Gambur Anglayang, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Pura ini dikenal juga dengan Pura Pancasila karena sejumlah palinggih yang ada mewakili sejumlah etnis hingga menjadi simbol pluralisme.

Seperti pada umumnya, pura ini terdiri dari tiga mandala. Pertama, mandala utama (jeroan) yang terdapat delapan palinggih utama yang merupakan gambaran dari berbagai etnis di dunia. Palinggih Ratu Bagus Sundawan mewakili etnis Sunda dengan penganut

Gambar 2. Berita Nusa Bali
"Ragam Palinggih Bukti Bhakti Multietnis"
(Sumber: Nusa Bali, 2024)

Frame ini pertama-tama mendefinisikan masalah (*problem definition*) secara implisit namun jelas. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut "isu intoleransi" seperti berita sebelumnya, *posisioning* Pura Gambur Anglayang sebagai "Pura Pancasila" dan "simbol pluralisme" serta penekanan pada keberagaman etnis dan agama dalam kompleks suci Hindu, secara kuat mengasosiasikannya dengan konteks sosial Indonesia yang kerap diwarnai ketegangan identitas. Masalah inti yang dibingkai adalah ancaman terhadap kerukunan hidup berbangsa dalam keberagaman dan potensi lunturnya nilai-nilai pluralisme. Definisi ini muncul dari kontras antara kompleksitas sosial modern dengan model harmonisasi yang ditawarkan pura kuno ini. Dengan menyebutnya "Pura Pancasila" istilah yang merujuk pada filosofi dasar negara Indonesia yang menjunjung persatuan dalam keragaman frame ini langsung menautkan keberadaan pura pada tantangan nasional terbesar: mempertahankan kohesi sosial di tengah perbedaan. Keberadaan palinggih (tempat suci) yang secara spesifik mewakili etnis Sunda (Kristen), Melayu, Mekah (Islam), Buddha-Cina (Ratu Ayu Syahbandar dan Ratu Manik Mas), dan Hindu (Ratu Pasek, Ratu Gede Siwa, Dewi Sri) dalam satu kompleks pura Hindu, diframing sebagai jawaban nyata dan sudah teruji terhadap masalah keretakan sosial akibat perbedaan. Masalahnya adalah potensi disintegrasi; solusi simbolisnya adalah integrasi sakral dalam Pura Pancasila.

Dalam menginterpretasikan penyebab (*causal interpretation*) pluralisme sakral ini, frame ini menawarkan narasi kausal yang kaya berbasis sejarah dan spiritualitas. Penjelasan Penyarikan (Pengurus) Pura, Nyoman Laken, menjadi pilar utama. Frame ini mengaitkan penyebab keberagaman fisik dan spiritual pura dengan dua faktor utama yang terjal: dinamika perdagangan internasional abad ke-13 dan respon spiritual berbasis kaul (janji). Narasi sejarah menempatkan pura di lokasi pelabuhan dagang internasional "Kuta Banding" (atau Tabaning/Kuta Baneng), yang menjadi titik temu pedagang dari "berbagai negara yang mewakili berbagai etnis". Ini menjadi interpretasi kausal sosiologis-ekonomi: Keberagaman adalah produk alami dan organik dari interaksi perdagangan global yang intensif di masa lampau. Penyebab langsung pendirian pura adalah peristiwa mistis-spiritual: kapal pedagang multietnis/multireligi yang bocor memohon pertolongan pada "kekuatan mistis" di palinggih yang sudah ada di pelabuhan. Mereka berkaul akan membangun tempat suci jika selamat. Doa mereka terkabul, dan mereka menepati janji dengan membangun Pura Gambur Anglayang, mengabadikan keberagaman mereka dalam bentuk *palinggih-palinggih*. Di sini, interpretasi kausal bersifat spiritual-resiprokal: Harmoni dan integrasi tercipta dari (1) pengakuan dan penghormatan terhadap kekuatan spiritual lokal oleh pendatang yang berbeda keyakinan, (2) pemenuhan kaul sebagai bentuk rasa syukur dan komitmen, dan (3) perwujudan fisik komitmen itu dalam bentuk pura yang mengakomodasi keragaman. Legenda ini bukan sekadar cerita rakyat, tetapi menjadi penjelasan kausal yang melegitimasi keberadaan simbol-simbol non-Hindu dalam pura Hindu. Frame ini menegaskan bahwa akar pluralisme Bali bukanlah toleransi pasif, tetapi integrasi aktif yang lahir dari interaksi nyata dan pengalaman spiritual bersama.

Aspek evaluasi moral (*moral evaluation*) dalam frame ini sangat kuat dan multidimensi, mengangkat nilai-nilai pluralisme, penghormatan, dan kearifan spiritual ke tingkat yang sangat luhur dan patut diteladani. Evaluasi moral dibangun melalui beberapa strategi utama. Pertama, sakralisasi keberagaman: Keberadaan fisik palinggih berbagai etnis/agama di dalam kompleks pura Hindu yang utama (*jeroan*) bukanlah sekadar ornamen, tetapi entitas yang "disakralkan" dan dipercaya hingga kini, seperti diungkapkan Laken. Trans (*kerauhan*) medium Ratu Syahbandar yang berbahasa Cina

dan anugerah kain wastra gaib dari Ratu Bagus Sundawan (Kristen) diframing bukan sebagai keanehan, tetapi sebagai bukti empiris-mistis akan kesaktian dan realitas spiritual dari entitas-entitas yang mewakili keragaman tersebut. Ini memberikan legitimasi transenden pada nilai pluralisme. Kedua, keunikan sebagai kebanggaan dan legitimasi: Penekanan berulang pada "keunikan" pura, julukan "Pura Pancasila", dan detail arsitektur spesifik (misalnya lukisan bernuansa Bunda Maria di Palinggih Ratu Bagus Sundawan, ornamen Cina pada stana Ratu lainnya) mengevaluasi keberagaman ini sebagai sesuatu yang istimewa, membanggakan, dan merupakan bagian otentik dari warisan budaya Bali, bukan sesuatu yang asing atau dipaksakan. Ketiga, kontinuitas sejarah sebagai kebenaran moral: Usia pura yang disebut berasal dari abad ke-13 (tahun 1260) dan pemeliharaan berkelanjutan hingga sekarang (termasuk penggunaan kain wastra "berusia ratusan tahun" dalam upacara) diframing sebagai bukti ketahanan dan kebenaran abadi dari model pluralisme yang diwakilinya. Apa yang bertahan sepanjang sejarah dianggap bernilai moral tinggi. Keempat, pengakuan otoritas kultural: Peran sentral penyampaian narasi oleh Penyarikan Pura, Nyoman Laken, seorang yang telah "puluhan tahun ngayah (bakti)" di pura, memberikan otoritas dan legitimasi kultural pada interpretasi yang disajikan. Pengetahuannya yang mendalam tentang sejarah, mitos, dan praktik ritual menjadi dasar evaluasi moral yang kredibel dalam konteks lokal. Kelima, fungsionalisasi nilai nasional: Penyematan istilah "Pura Pancasila" secara eksplisit mengaitkan nilai-nilai lokal pluralisme sakral ini dengan fondasi ideologi bangsa Indonesia. Ini mengevaluasi praktik kuno Bali bukan hanya sebagai warisan lokal, tetapi sebagai kontribusi nyata dan preseden historis bagi filosofi kebangsaan Indonesia. Secara keseluruhan, evaluasi moral frame ini jelas: Menghormati, memelihara, dan mengintegrasikan perbedaan agama dan etnis ke dalam tatanan spiritual dan budaya lokal adalah nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur, terbukti sakral dan fungsional, serta selaras dengan jiwa Pancasila, karenanya merupakan kewajiban moral untuk dilestarikan dan diteladani.

Berdasarkan definisi masalah dan evaluasi moral tersebut, frame ini merekomendasikan solusi perlakuan (*treatment recommendation*) baik secara implisit maupun eksplisit terhadap tantangan kerukunan berbangsa. Rekomendasi utamanya berpusat pada meneladani, memelihara, dan menghidupkan model pluralisme sakral yang diwujudkan oleh Pura Gambur Anglayang. Pertama, pelestarian warisan fisik dan praktik ritual direkomendasikan sebagai tindakan krusial. Pemeliharaan palinggih-palinggih bersejarah beserta artefaknya (seperti kain wastra kuno), serta kelangsungan pelaksanaan upacara seperti piodalan pada Purnama Sasih Kalima yang masih melibatkan simbol-simbol keragaman, diframing bukan hanya sebagai kewajiban agama Hindu, tetapi sebagai pemeliharaan *living monument* bagi pluralisme. Kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap kekhasan spiritual setiap entitas dalam kompleks pura direkomendasikan. Pengakuan akan kesaktian Ratu Bagus Sundawan (Kristen) yang menganugerahi kain, atau medium Ratu Syahbandar (Cina/Buddha) yang berbahasa Cina, menunjukkan bahwa solusi kerukunan melibatkan pengakuan tulus terhadap eksistensi dan peran spiritual masing-masing komponen dalam kesatuan yang lebih besar, bukan asimilasi atau penghapusan identitas. Ketiga, pembelajaran dan internalisasi narasi historis-spiritual tentang asal-usul pura direkomendasikan. Kisah pedagang multietnis yang berkaul dan membangun pura bersama setelah diselamatkan kekuatan lokal menjadi *blueprint* tentang bagaimana kerukunan bisa dibangun: melalui pengalaman bersama, penghormatan timbal balik (*resiprositas spiritual*), dan komitmen bersama untuk mewujudkan simbol persatuan yang konkret dan abadi. Keempat, penguatan identitas

budaya Bali yang inklusif direkomendasikan. Frame ini mendorong pandangan bahwa keberagaman dan toleransi aktif adalah bagian tak terpisahkan, bahkan bersifat sakral, dari identitas asli Hindu Bali, bukan nilai impor. Pura Gambur Anglayang menjadi bukti otentiknya. Memperkuat identitas ini menjadi fondasi untuk berkontribusi pada kerukunan nasional. Kelima, promosi "Pura Pancasila" sebagai model simbolik dan praktis direkomendasikan secara implisit. Julukan ini bukan sekadar label, tetapi seruan untuk melihat pura ini sebagai prototipe nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Persatuan Indonesia, dapat diwujudkan dalam praktik kultural-spiritual yang mendalam dan berkelanjutan. Keberadaannya direkomendasikan sebagai situs pembelajaran dan refleksi bagi masyarakat luas.

3.3 Analisis Framing Berita Detik Bali

Pura Pancasila di Bali Utara, 8 Pelinggih Cerminkan Keberagaman

Made Wijaya Kusuma - detikBali

Jumat, 24 Jun 2022 07:27 WIB



Pura Negara Gambur Anglayang atau Pura Pancasila terletak di Bali Utara. Terdapat 8 pelinggih yang mencerminkan unsur keberagaman di kawasan pura tersebut. (Foto: Made Wijaya Kusuma/detikBali)

Buleleng - Pura Negara Gambur Anglayang merupakan salah satu pura tertua di Bali Utara. Pura ini terletak di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Kawasan suci pura ini cukup unik karena di dalamnya terdapat 8 *pelinggih* yang mencerminkan unsur keberagaman. Itulah sebabnya, Pura Negara Gambur Anglayang juga disebut sebagai Pura Pancasila.

Gambar 3. Berita Detik Bali

“Pura Pancasila di Bali Utara, 8 Pelinggih Cerminkan Keberagaman”
(Sumber: Detik Bali, 2022)

Penerapan model framing Robert M. Entman pada berita mengenai Pura Negara Gambur Anglayang di Buleleng, Bali, ini mengungkap konstruksi realitas yang sangat terstruktur dan bermakna. Entman mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk mendefinisikan masalah, menginterpretasikan penyebabnya, melakukan evaluasi moral, dan merekomendasikan solusi. Berita ini secara dominan membangun frame "Pura Pancasila: Pluralisme Sakral sebagai DNA Kebangsaan Indonesia yang Teruji Waktu dan Terbukti Kemanjuran", menempatkan pura kuno ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan sebagai simbol hidup, bukti historis, dan sekaligus resep fungsional bagi tantangan kerukunan berbangsa kontemporer, dengan memadukan legitimasi sejarah, spiritualitas, dan nasionalisme secara persuasif.

Frame ini mendefinisikan masalah (*problem definition*) secara implisit namun sangat terasa melalui kontras yang dibangun. Julukan "Pura Pancasila" yang ditonjolkan sejak awal bukanlah label kosong; ia langsung menautkan keberadaan pura pada filosofi dasar negara Indonesia yang menjunjung persatuan dalam keragaman (Bhinneka Tunggal Ika). Penyebutan kedelapan palinggih yang secara spesifik mewakili Suku Sunda (Ratu Bagus Sundawan), Suku Melayu (Ratu Bagus Melayu), etnis China/Buddha (Ratu Ayu Syahbandar dan Ratu Manik Mas), Hindu (Ratu Pasek, Dewi Sri, Ratu Gede Siwa), dan Muslim (Ratu Gede Dalem Mekah) dalam satu kompleks suci Hindu, diframing sebagai jawaban nyata dan sudah berabad-abad teruji terhadap masalah inti yang dihadapi bangsa: potensi disintegrasi sosial dan ancaman terhadap kerukunan hidup berbangsa akibat perbedaan etnis dan agama. Masalahnya adalah bagaimana mempertahankan kohesi nasional di tengah keragaman yang kompleks; keberadaan fisik dan sejarah Pura Gambur Anglayang serta julukannya sebagai "Pura Pancasila" ditampilkan sebagai solusi simbolis dan praktis yang sudah ada sejak lama. Definisi masalah ini diperkuat oleh narasi konteks historisnya sebagai bekas pelabuhan internasional "Kuta Banding", pusat pertemuan pedagang "dari berbagai etnis dan agama", menyiratkan bahwa tantangan keragaman bukanlah hal baru, dan Bali telah memiliki mekanisme kultural-spiritual untuk mengelolanya secara harmonis jauh sebelum Indonesia merdeka.

Dalam menginterpretasikan penyebab (*causal interpretation*) mengapa model pluralisme sakral ini bisa terwujud dan bertahan, frame ini menawarkan narasi kausal yang kaya berbasis sejarah nyata, mitos pendirian, dan kemanjuran spiritual. Penyebab utamanya dirujuk pada dinamika perdagangan internasional abad ke-13 di Pelabuhan Kuta Banding. Posisi geografis dan ekonomi sebagai pusat niaga Nusantara menjadi interpretasi kausal sosiologis: Keberagaman etnis dan agama adalah konsekuensi alami dan organik dari interaksi ekonomi global yang intensif. Namun, penyebab langsung pendirian pura dan bentuk pluralismenya yang unik berasal dari peristiwa spiritual-resiprokal. Narasi tentang kapal pedagang multietnis/multireligi yang mengalami kerusakan, panik, lalu bersembahyang memohon keselamatan di sebuah palinggih yang sudah ada di pelabuhan ("Mereka bersembahyang di sana... mohon keselamatan dan kelancaran usaha") menjadi titik balik. Mereka membuat kaul: jika selamat, akan membangun tempat suci di situ. Keselamatan yang mereka peroleh kemudian menggerakkan mereka menepati janji dengan membangun Pura Gambur Anglayang, mengabadikan keberagaman mereka dalam bentuk delapan palinggih spesifik. Di sini, interpretasi kausal bersifat spiritual-timbal balik: Integrasi keragaman tercipta dari (1) pengakuan dan penghormatan pedagang asing terhadap kekuatan spiritual lokal (Hindu) di saat krisis, (2) pemenuhan kaul sebagai bentuk rasa syukur dan komitmen bersama, dan (3) perwujudan fisik komitmen itu dalam bentuk pura yang secara struktural mengakomodasi identitas asal mereka. Legenda ini menjadi penjelasan kausal yang melegitimasi keberadaan simbol-simbol non-Hindu dalam pura Hindu sekaligus menegaskan bahwa akar pluralisme Bali adalah hasil interaksi nyata dan pengalaman spiritual bersama yang melahirkan komitmen kolektif. Penyebab tambahan yang sangat kuat adalah intervensi sejarah nasional melalui figur Soekarno. Kisah Soekarno bersembunyi di pura dari kejaran Belanda tahun 1941 dan kemudian menghaturkan bendera Merah Putih tahun 1950, serta konon memberi julukan "Pura Pancasila", menambahkan lapisan kausalitas nasionalistik. Peristiwa ini diframing sebagai pengakuan dan pengukuhan dari Bapak Pendiri Bangsa bahwa nilai yang diwujudkan pura ini selaras dengan jiwa Pancasila, sehingga julukan itu menjadi sebab sekaligus legitimasi tambahan identitasnya sebagai simbol pluralisme kebangsaan.

Aspek evaluasi moral (*moral evaluation*) dalam frame ini sangat kuat, multidimensional, dan mencapai tingkat sakralisasi terhadap nilai pluralisme. Evaluasi moral dibangun melalui beberapa pilar utama. Pertama, sakralisasi dan bukti kemanjuran spiritual. Keberadaan palinggih berbagai etnis/agama di dalam *jeroan* (area tersuci) pura Hindu bukan sekadar simbol, tetapi entitas yang "dikeramatkan" dan dipercaya memiliki kekuatan spiritual nyata. Kesaksian Nyoman Laken bahwa banyak pemedek "*mapinunas* (memohon) disini, dan banyak yang berhasil", khususnya dalam "dunia kerja, mulai politik sampai dengan usaha", menjadi bukti empiris-mistis akan kemanjuran dan kesaktian pura secara keseluruhan beserta entitas di dalamnya. Keberhasilan ini dievaluasi sebagai buah dari kerukunan dan kesakralan tempat tersebut, sehingga nilai pluralismenya mendapatkan legitimasi transenden. Kedua, keunikan sebagai kebanggaan dan identitas otentik. Penekanan berulang pada "keunikan" pura, julukan "Pura Pancasila", dan deskripsi rinci ciri khas setiap *palinggi* (meski artikel ini kurang detail dibanding sebelumnya, implikasi keunikan tetap kuat) mengevaluasi keberagaman terintegrasi ini sebagai sesuatu yang istimewa, membanggakan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Bali yang asli. Ketiga, kontinuitas sejarah dan legitimasi nasional. Usia pura dari abad ke-13 dan kaitannya dengan Soekarno memberikan legitimasi historis yang dalam. Fakta Soekarno simbol utama nasionalisme Indonesia mencari perlindungan di sini dan kemudian menghaturkan bendera nasional serta (konon) memberinya nama "Pura Pancasila", mengevaluasi tempat ini bukan hanya sebagai situs lokal, tetapi sebagai simbol nasional yang diakui oleh pendiri bangsa, menyatu dengan identitas dan ideologi negara. Ini memberikan bobot moral dan nasional yang luar biasa. Keempat, otoritas narator kultural. Peran sentral Penyarikan Pura, Nyoman Laken (72), yang telah lama mengabdikan ("puluhan tahun *ngayah*"), sebagai penyampai sejarah dan kesaksian, memberikan otoritas dan kredibilitas kultural pada evaluasi yang disampaikan. Pengetahuannya yang langsung menjadi dasar evaluasi moral yang kuat. Kelima, keselarasan dengan Pancasila. Julukan "Pura Pancasila" itu sendiri merupakan evaluasi moral tertinggi, menempatkan praktik kuno pluralisme Bali ini sebagai perwujudan nyata dan preseden historis dari filosofi kebangsaan Indonesia yang paling mendasar. Secara keseluruhan, evaluasi moral frame ini jelas dan luhur: Menghormati, memelihara, dan mengintegrasikan perbedaan etnis dan agama ke dalam tatanan spiritual-budaya lokal adalah nilai mulia yang diwariskan leluhur, terbukti sakral dan manjur, diakui oleh pendiri bangsa, dan selaras dengan jiwa Pancasila; karenanya merupakan kewajiban moral untuk dilestarikan dan dijadikan teladan bagi bangsa.

Berdasarkan definisi masalah dan evaluasi moral tersebut, frame ini merekomendasikan solusi perlakuan (*treatment recommendation*) terhadap tantangan kerukunan berbangsa secara implisit namun sangat kuat. Rekomendasi utamanya berpusat pada meneladani, memelihara, menghidupkan, dan memanfaatkan model pluralisme sakral yang diwujudkan oleh Pura Gambur Anglayang sebagai "Pura Pancasila". Pertama, pelestarian dan penghormatan aktif terhadap warisan fisik dan praktik ritual pura direkomendasikan sebagai tindakan esensial. Pemeliharaan delapan palinggih bersejarah beserta kelangsungan aktivitas keagamaan seperti sembahyang dan "*mapinunas*" diframing bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan Hindu, tetapi sebagai pemeliharaan *living monument* dan sumber daya spiritual bagi pluralisme dan kemakmuran bangsa. Kedua, peneladanan terhadap semangat resiprositas dan komitmen kolektif yang melahirkan pura. Kisah pedagang multietnis yang menghormati kekuatan lokal, berkaul, dan bersama-sama membangun pura sebagai wujud syukur dan janji, menjadi *blueprint* perilaku: solusi kerukunan memerlukan pengakuan timbal balik,

komitmen bersama, dan perwujudan nyata simbol atau institusi pemersatu. Ketiga, penguatan identitas budaya Bali yang inklusif sebagai kontribusi nasional. Frame ini mendorong pandangan bahwa keberagaman terintegrasi dan toleransi aktif adalah bagian tak terpisahkan (DNA) dari identitas asli Hindu Bali. Memperkuat identitas lokal inklusif ini direkomendasikan sebagai fondasi untuk berkontribusi pada kerukunan dan kemajuan nasional. Keempat, pemanfaatan "Pura Pancasila" sebagai situs pembelajaran, refleksi, dan permohonan bagi masyarakat luas. Fungsi pura sebagai tempat yang "kerap didatangi oleh *pamedek*" yang mencari "keselamatan dan kesuksesan", serta kaitannya dengan kesuksesan dalam "politik sampai dengan usaha", merekomendasikan tempat ini tidak hanya sebagai objek kajian sejarah/toleransi, tetapi sebagai destinasi spiritual yang relevan untuk kebutuhan kontemporer, memperkuat koneksi emosional dan spiritual masyarakat dengan nilai-nilai pluralismenya. Kelima, internalisasi nilai "Pura Pancasila" sebagai pedoman hidup berbangsa. Julukan yang konon diberikan Soekarno direkomendasikan untuk dipahami secara mendalam: bahwa nilai-nilai yang diwujudkan pura ini kerukunan dalam keragaman, penghormatan timbal balik, komitmen pada tanah air adalah esensi Pancasila itu sendiri. Meresapi nilai ini menjadi kunci solusi bagi tantangan kebinekaan Indonesia.

IV. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa framing media lokal terhadap Pura Negara Gambur Anglayang secara umum merepresentasikan narasi yang positif dan mendukung citra pura sebagai simbol moderasi beragama dan toleransi di Bali Utara. *Bali Express* membingkai pura sebagai ruang integrasi budaya yang mendukung pariwisata spiritual dan harmoni lokal, sementara *Nusa Bali* lebih menekankan peran sosial dan keagamaan pura sebagai pengikat relasi antarkelompok masyarakat. *Detik Bali*, meskipun merupakan bagian dari jaringan media nasional, cenderung menyajikan narasi simbolik yang mengangkat isu toleransi dalam konteks nasional, dengan penyederhanaan terhadap dinamika lokal. Ketiganya menunjukkan pola framing yang memperkuat citra keberagaman yang damai, namun memiliki titik fokus narasi yang berbeda sesuai karakteristik media masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa konstruksi media, khususnya media lokal, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang ruang keagamaan sebagai arena komunikasi antarbudaya. Representasi media tersebut sebagian besar sejalan dengan praktik komunikasi antarbudaya yang terjadi di masyarakat Kubutambahan, di mana toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kolaborasi lintas agama telah menjadi bagian dari realitas sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa framing media juga dapat menciptakan romantisasi yang tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika atau potensi ketegangan yang ada. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap media dan pemahaman langsung terhadap konteks lokal perlu terus dikembangkan agar representasi yang disampaikan tidak hanya idealistik, tetapi juga reflektif terhadap realitas masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian komunikasi budaya dan literasi media dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara konstruksi wacana media dan realitas sosial yang dihidupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2022). Media sosial dan simbol toleransi keagamaan: Studi representasi pura dalam Instagram komunitas multikultural. *Jurnal Komunikasi Agama dan Budaya*, , 157–170. <https://doi.org/10.25078/jkab.v10i2.2022>

- Astika, I. M. (2020). Representasi media lokal terhadap tradisi keagamaan Bali: Studi wacana kritis pada media cetak lokal. *Jurnal Ilmu Komunikasi Udayana*, 25–38. <https://doi.org/10.24843/jiku.2020.v8.i1.p3>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Penguin Books.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Gudykunst, W. B. (2003). *Cross-cultural and intercultural communication*. Sage Publications.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- Liliweri, A. (2009). *Komunikasi Antar Budaya*. Prenada Media.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2013). *Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia*. Centre for Innovation Policy and Governance.
- Sobur, A. (2009). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotika dan analisis framing*. Remaja Rosdakarya.
- Ting-Toomey, S., & Dorjee, T. (2018). *Communicating across cultures*. Guilford Press.
- Van Dijk, T. A. (2006). *Discourse and manipulation*. *Discourse & Society*, 359–383. <https://doi.org/10.1177/0957926506060250>
- Wirjomartono, B. (2014). *Heritage of Bali: A cultural history of place, people, and architecture*. Springer.
- Wulandari, D. (2021). Framing media nasional dalam pemberitaan tempat ibadah multikultural di Jakarta. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 88–102. <https://doi.org/10.22146/jkm.v12i3.2021>
- Yulianto, A. (2018). Narasi pluralisme dalam framing media nasional: Studi kasus pemberitaan isu keagamaan di Kompas dan Republika. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 45–60. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i1.2018.pp45-60>